

Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Oleh:

¹ Andri Irawan; ² Rachmat Agung

¹². Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

Email. andrirawan@unmus.ac.id

Abstrak

Upaya untuk menjadikan masyarakat berdaya tidaklah mudah, maka perlu dirumuskan sebuah model yang tepat dalam melaksanakan program tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis program pemberdayaan masyarakat pesisir Kampung Urumb, serta aspek internal dan eksternal individu yang mempengaruhinya.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan cara : Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal individu masyarakat pesisir masih lemah dalam hal pendidikan, ekonomi, budaya, dan sikap masyarakat terhadap kemiskinan, namun telah cukup baik dalam hal kehidupan sosial seperti kekerabatan dan kegotongroyongan. Sedangkan dari aspek eksternal bahwa program bantuan yang diberikan telah diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat melalui bantuan permodalan dan fasilitas, akan tetapi tidak pada peningkatan kualitas individu dan kelembagaannya. Maka rekomendasi yang dihasilkan adalah pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir perlu memperhatikan dua aspek yaitu aspek internal terutama peningkatan kesadaran akan pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan yang sesuai dengan potensi usaha yang dapat dikembangkan, dan aspek eksternal yaitu mengupayakan agar masyarakat tidak merusak lingkungan dengan pengalian pasir agar lingkungan dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi secara berkelanjutan melalui potensi wilayah yang dimiliki. Selain itu, perlu adanya sinkronisasi antara bantuan yang diberikan dengan potensi usaha yang ada.

Kata Kunci: Masyarakat Pesisir; Pemberdayaan, Pengentasan Kemiskinan.

Abstract

Efforts to make society empowered are not easy, so it is necessary to formulate an appropriate model for implementing the program. This research aims to identify and analyze the coastal community empowerment program of Kampung Urumb, as well as the internal and external aspects of individuals who influence it. This research uses a qualitative approach where data is obtained through observation and interviews which are then analyzed using: Data Condensation, Data Display, and Conclusion Drawing/Verifications. The results of the research show that the internal factors of individual coastal communities are still weak in terms of education, economics, culture, and community attitudes towards poverty, but are quite good in terms of social life such as kinship and cooperation. Meanwhile, from the external aspect, the assistance program provided has been directed at community empowerment efforts through capital and facility assistance, but not at improving the quality of individuals and institutions. So the resulting recommendation is that the empowerment of coastal communities needs to pay attention to two aspects, namely the internal aspect, especially increasing awareness of community education and skills through training in accordance with the business potential that can be developed, and the external aspect, namely ensuring that the community does not damage the environment by excavating sand so that the environment can be destroyed. can become a source of sustainable economic income through the potential of the region it has. Apart from that, there needs to be synchronization between the assistance provided and existing business potential.

Keywords: Coastal Communities; Empowerment, Poverty Alleviation.

PENDAHULUAN

Kawasan pesisir Indonesia sejatinya kaya akan potensi alam, baik itu dari segi hasil laut maupun dalam konteks pariwisata. Akan tetapi, kita melihat bahwa masalah kemiskinan masih saja melekat pada masyarakat pesisir. Sehingga fakta sosial ini menimbulkan kesan ironi ditengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang ada di pesisir dan lautan. Menurut (Kusnadi, 2017) ada dua penyebab kemiskinan pada masyarakat pesisir, yaitu penyebab yang sifatnya internal dan external yang keduanya saling berinteraksi dan melengkapi. Penyebab kemiskinan yang sifatnya internal yaitu berkaitan dengan kondisi internal sumber daya manusia masyarakat pesisir dan aktifitas pekerjaan mereka. Factor ini mencakup masalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh; kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi laut; dan gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan .

Masalah-masalah diatas tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait satu sama lain . Misalnya, masalah kemiskinan ini disebabkan oleh hubungan-hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, kualitas sumber daya manusia rendah, dan degradasi sumber daya lingkungan (Hamdani & Wulandari, 2016). Karena itu penyelesaian persoalan kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat integralistik. Kalaupun harus memilih salah satu factor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, pilihan ini haruslah benar-benar menjangkau semua factor yang lain atau harus menjadi motor dalam mengatasi masalah-masalah yang lainya.

Kondisi masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Merauke juga tidaklah jauh berbeda dengan masyarakat pesisir yang ada di Indonesia pada umumnya. Meskipun harus diakui bahwa selama ini telah banyak program pengentasan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat pesisir termasuk masyarakat pesisir Kampung Urumb di Kabupaten Merauke. Akan tetapi, hasilnya belum mampu memberdayakan mereka untuk keluar dari perangkap kemiskinan yang menggurita. Dari hasil observasi yang dilakukan di Kampung Urumb Kabupaten Merauke terlihat bahwa kehidupan ekonomi masyarakat pesisir setempat umumnya tergolong miskin. Hal ini diakibatkan oleh ketidakadilan harga ikan yang telah di monopoli oleh tengkulak. Sehingga nelayan tidak mampu menentukan sendiri harga jual hasil tangkapan mereka. Permasalahan berikutnya adalah lemahnya sumber daya manusia yang rata-rata tingkat pendidikan masyarakat hanya sebatas pada Sekolah Dasar yang mengakibatkan mereka mengalami keterbatasan teknologi dan modal, serta lemahnya organisasi kelompok-kelompok usaha masyarakat.

Melihat beberapa permasalahan tersebut, maka menjadi wajar jika beberapa tahun belakangan ini wilayah pesisir menjadi pusat perhatian pemerintah dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir memiliki beragam kekayaan alam yang tersimpan didalamnya, dan potensi sumber daya alam yang tinggi tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengembangan dan pembangunan. Seperti kajian yang dilakukan oleh (Setyo Putra & Rahaju, 2022) bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Perikanan Budidaya telah mampu meningkatkan usaha perikanan setempat dengan

memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu, dari hasil kajian oleh (Winata, 2023) dikatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat telah mendorong terpenuhinya kebutuhan baik individu, kelompok dan masyarakat luas sehingga mereka dapat membuat pilihan dan membentuk lingkungan mereka untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk akses untuk bekerja, kegiatan sosial dan sumber daya lain.

Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada seluruh aspek yang mendasar dari manusia di lingkungannya mulai dari aspek intelektual, aspek material, hingga kepada aspek manajerial (Sutarto, 2018). Harapannya adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat mampu mendorong pemenuhan kebutuhan baik secara individu maupun kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga mereka dapat menentukan pilihan dan menciptakan lingkungan mereka sendiri demi terpenuhinya kebutuhan mereka termasuk akses untuk bekerja, kegiatan sosial dan sumber daya lainnya.

Dengan demikian, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (Karsidi, 2007), orientasi pemberdayaan haruslah membantu sasaran (masyarakat pesisir) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pesisir dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Sedangkan peran petugas pemberdayaan masyarakat (pendamping) sebagai *outsider people* adalah sebagai konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Sehingga peran serta kelompok sasaran yaitu warga itu sendiri jadi sangat dominan. Belajar dari pengalaman memperlihatkan ketika penguasa berperan sangat dominan serta masyarakat hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban belaka, maka masyarakat akan terus terpinggirkan dari proses pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) melakukan analisis terhadap potret kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi serta sikap masyarakat pesisir terhadap kemiskinan; (2) melakukan analisis terhadap potensi wilayah yang dapat dikembangkan oleh masyarakat, dan (3) melakukan analisis terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang telah diperoleh masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Urumb Kabupaten Merauke. Kampung tersebut dipilih karena wilayahnya yang berada di pesisir pantai dan sebagai Kampung Lokal yang dominan dihuni oleh Orang Asli Papua. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke kampung tersebut masih berada pada kategori kampung tertinggal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena melalui penelitian kualitatif peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang potensi dan situasi internal maupun external masyarakat setempat dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi disana, yang kemudian dirumuskan sebuah model baru dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Merauke khususnya Kampung Urumb. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan masyarakat pesisir, aparatur Kampung Urumb,

melakukan pengamatan terhadap potensi wilayah pesisir pantai, dan wawancara terhadap pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kampung Kabupaten Merauke terkait dengan program-program bantuan terhadap masyarakat pesisir. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model (Miles, M. B., Huberman, A. M. & Johnny, 2014) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis data yaitu: *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verifications*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke

Upaya pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil ketika masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan dapat “berdaya” atau mandiri sehingga tidak selalu tergantung kepada pemerintah atau orang lain (Irawan & Tanzil, 2020). Kerangka analisis dari konsep pemberdayaan dalam studi ini meliputi analisis faktor internal individu masyarakat pesisir dan analisis faktor eksternal masyarakat pesisir. Pada analisis internal, kebutuhan studi diarahkan pada pemahaman mengenai potensi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir dilihat dari faktor kemampuan, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi serta cara pandang masyarakat pesisir terhadap kemiskinan. Sedangkan pada analisis faktor eksternal, studi diarahkan pada pengkajian tentang potensi wilayah yang dapat dikembangkan oleh masyarakat pesisir sebagai sebuah peluang usaha, serta program-program bantuan yang telah diterima apakah telah sesuai dengan konsep pemberdayaan. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian berkaitan dengan faktor internal individu:

Pertama, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Posisi wilayah Kampung Urumb yang berada disepanjang pesisir kali kumbe sangat mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sana. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang ada di kampung tersebut tidak berbeda jauh dengan masyarakat pesisir yang ada di Indonesia pada umumnya, misalnya tingkat pendidikan yang masih rendah, akses terhadap modal usaha yang sulit (karena faktor pendidikan, informasi, dan kelembagaan kelompok), hasil produksi yang tergantung pada musim, teknologi produksi yang masih rendah, dan masalah pemasaran hasil produksi yang tidak pasti.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pekerjaan utama masyarakat pesisir umumnya adalah nelayan, menangkap ikan, udang, dan kepiting dengan menggunakan pancing dan jaring tradisional. Sebagian kaum pria juga menjadi buruh bangunan. Pekerjaan sebagai nelayan tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi juga oleh kaum wanita. Kondisi pada masyarakat pesisir Kampung Urumb ada sebagian kecil yang berprofesi sebagai petani padi dan kebun. Hal ini dikarenakan lahan-lahan untuk persawahan sangat minim, itu pun terlihat kondisinya kurang subur sehingga ada yang dapat ditanami padi dan ada juga yang dijadikan kebun pisang.

Dalam kehidupan keluarga, rata-rata mereka memiliki anggota keluarga yang cukup besar yakni empat sampai 6 orang. Secara umum tingkat pendidikan hanya tamat sekolah dasar dan sebagian kecil ada yang tamat SMP. Setelah tamat SD mereka membantu orang tua mereka untuk mencari ikan atau mengerjakan pekerjaan sebagai pemburu di hutan. Beberapa diantara mereka terpaksa untuk berhenti sekolah karena

harus membantu bekerja sebagai pencari ikan untuk meringankan beban keluarga. Pada sebagian masyarakat pesisir, yang menjadi prioritas adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau makan sehari-hari, sehingga kewajiban untuk menyekolahkan anak tidak terlalu menjadi perhatian utama. Semua permasalahan terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat pesisir (Phoek, 2022). Rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat tersebut telah mengakibatkan pola fikir mereka tidak berkembang sehingga tidak mampu untuk mencari alternatif lain.

Kedua, sosial-budaya masyarakat pesisir. Agama yang dianut oleh masyarakat pesisir Kampung Urumb umumnya adalah agama Katolik. Budaya mereka pada dasarnya sama dengan budaya suku Marind (Suku Asli Merauke) pada umumnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat tercermin dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selain rutinitas sehari-hari seperti berburu, mencari ikan, memasak, ngobrol dengan tetangga, mereka juga masih tetap menjaga kekerabatan diantara tetangga. Hal ini terbukti dengan banyaknya pendopo tempat-tempat berteduh atau yang dalam masyarakat setempat disebut dengan ‘honai’ yang biasa digunakan oleh masyarakat berbincang-bincang dengan tetangga. Sistem sosial budaya yang sudah terbentuk bagus seperti ini akan dapat menjadikan pendorong dalam berhasilnya sebuah program pemberdayaan (Irawan & Tanzil, 2020).

Ketiga, sikap masyarakat pesisir terhadap kemiskinan. Sikap sangat ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan dan pengalaman seseorang terhadap obyek tertentu. Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan obyek sikap. Sikap merupakan sebuah konsep yang abstrak, dan hanya dapat dipahami melalui perilaku seseorang. Sehingga ketika kita telah memahami sikap seseorang, maka sudah barang tentu kita dapat memahami bagaimana kecenderungan orang tersebut berperilaku. Dalam penelitian ini, sikap masyarakat pesisir terhadap kemiskinan, akan menggambarkan bagaimana perilaku masyarakat pesisir menghadapi kemiskinan itu sendiri.

Hasil penelitian mengenai sikap masyarakat pesisir secara keseluruhan di Kampung Urumb terhadap kemiskinan pada umumnya menunjukkan hal yang sama. Pada masyarakat yang diteliti dapat dikatakan bahwa masyarakat telah cukup menyadari kemiskinan yang dialami, akan tetapi mereka belum mampu untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinan yang menjeratnya. Hal ini terlihat dari sudah banyak program-program yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi pola fikir masyarakat yang instan membuat mereka tidak mampu untuk menjalankan program-program tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh (Adawiyah, 2020) bahwa upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan dapat berhasil jika tidak didukung oleh element pembangunan lainnya, baik itu pihak swasta maupun masyarakat, terlebih lagi dari individu itu sendiri. Sebab untuk terbebas dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kemauan dan kesungguhan dari individu tersebut.

Akibat dari pola fikir instan ini adalah masyarakat akhirnya menjual tanah pekarangannya sebagai pasir / tanah timbunan yang akhirnya berdampak kepada

rusaknya lingkungan. Penggalian pasir di sepanjang wilayah pesisir Kampung Urumb sudah dilakukan sejak lama. Harus diakui bahwa dari penjualan pasir ini masyarakat kampung mendapatkan penghasilan untuk melanjutkan hidup. Akan tetapi, yang tidak kalah pentingnya adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggalian pasir antara lain kerusakan jalan dan jembatan, banjir rob karena air pasang yang terlalu jauh masuk ke rumah pemukiman penduduk, kerusakan hutan mangrove di sekitar pesisir pantai dan berkurangnya jumlah tangkapan ikan dan kepiting karena rusaknya ekosistem di hutan mangrove (Widiastuti et al., 2018). Pada gambar dibawah ini adalah Sebagian kecil kerusakan yang diakibatkan penggalian tanah / pasir di Kampung Urumb Kabupaten Merauke.



Gambar 1 & 2 Tanah pekarangan akibat penggalian pasir

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari faktor internal individu dapat dikatakan masih lemah untuk diberdayakan, terutama dari aspek keterampilan, sikap, dan budaya. Oleh karena itu, maka upaya yang perlu diperhatikan pemerintah adalah meningkatkan kemampuan individu masyarakat pesisir melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan keterampilan terkait dengan potensi usaha yang dapat dikembangkan di kampung tersebut. Sehingga tidak lagi hanya bergantung kepada penggalian pasir yang tentu sudah berdampak buruk terhadap lingkungan. Dalam hal budaya, pemerintah terutama instansi terkait (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) hendaknya lebih giat untuk membuat kegiatan pameran budaya di sepanjang kampung pesisir tersebut, karena wilayah di sepanjang pesisir kali kumbe juga adalah kawasan adat marind yang harus dijaga dan dilestarikan adat istiadat dan budayanya. Selain itu, diharapkan dapat selalu memberikan penguatan tentang budaya masyarakat yang giat dalam menjaga lingkungan, seperti menghidupkan kembali hukum ‘sasi’ di masyarakat agar lingkungan dapat Kembali terjaga.

Berkaitan dengan faktor eksternal, kebutuhan penelitian ini diarahkan pada analisis faktor lingkungan fisik (potensi wilayah) yang dapat dikembangkan oleh masyarakat pesisir serta program-program bantuan pemerintah yang telah diperoleh selama ini. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai faktor eksternal tersebut. Pertama, pemetaan kondisi dan potensi pesisir pantai. Berdasarkan hasil pengamatan dan studi dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, beberapa potensi

sumber daya alam yang ada di pesisir pantai Kabupaten Merauke khususnya sepanjang Kali Kumbe sebagai berikut: (1) Estuaria (daerah pantai pertemuan antara air laut dan air tawar khususnya yang ada di Kampung Urumb) berpotensi sebagai daerah penangkapan ikan (*fishing grounds*) yang baik; (2) pesisir pantai yang ditumbuhi mangrove sebagai tempat berkembangbiaknya ikan-ikan dan biota laut lainnya misalkan kepiting dan udang. (3) banyaknya udang yang dipanen ketika musim maka biasa masyarakat mengolahnya menjadi terasi; (4) pantai berpasir yang selain potensi untuk mencari biota laut juga memiliki nilai pariwisata yang sudah mulai dimanfaatkan masyarakat setempat.

Kedua, berkaitan dengan usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat pesisir secara umum usaha yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya alam yang tersedia dari masyarakat Kampung Urumb adalah: (1) sebagai nelayan tangkap; (2) sebagai pembuat terasi; (3) pengrajin kerang-kerangan; dan (4) mengolah ikan menjadi bahan makanan yang bernilai ekonomis.

Pekerjaan sebagai nelayan tangkap sebenarnya telah lama ditekuni oleh warga yang hidup di pesisir pantai. Karena kondisi alam yang memberikan banyak kemudahan untuk mencari ikan, pekerjaan ini telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat pesisir. Dengan bermodalkan jala dan pancing para nelayan dapat membawa pulang hasil tangkapan ikan. Namun belakang ini, banyak nelayan tidak lagi melaut dengan alasan biaya operasional sebagai nelayan semakin tinggi sehingga seringkali hasil tangkapan tidak dapat memenuhi biaya operasional dan hanya digunakan sebagai pemenuhan makanan sehari-hari saja.

Biota laut seperti kerang-kerangan yang tumbuh di pesisir pantai dapat pula dijadikan sebagai sebuah potensi usaha. Ditangan orang-orang yang berjiwa seni, kulit kerang-kerangan dapat disulap menjadi hiasan dinding dan berbagai cenderamata yang menarik, dan tentu saja ini dapat bernilai untuk sebuah usaha. Kerang merupakan nama sekumpulan moluska dwicangkang (*bivalvia*) dari *family cardiidae* yang merupakan salah satu komoditi perikanan yang telah lama dibudidayakan sebagai salah satu usaha sampingan masyarakat pesisir (Sudirman & Rosramadhana, 2022). Dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat pesisir Kampung Urumb, sayangnya mereka belum ada yang menekuni pekerjaan ini karena tidak memiliki keterampilan untuk itu.

Pada musim-musim tertentu, hasil tangkapan nelayan dapat melimpah sehingga harga menjadi rendah. Disini terjadi hukum pasar yakni harga ditentukan oleh *supply and demand*. Ketika hasil tangkapan melimpah, seharusnya ibu-ibu nelayan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengolah ikan-ikan tersebut menjadi aneka macam olahan yang dapat bernilai ekonomi tinggi. Akan tetapi faktor sumber daya manusia menjadi kendala sehingga peluang usaha ini belum bisa dikembangkan, dan mereka hanya menjual hasil laut berapapun harganya dari pada tidak terjual dan akhirnya membusuk.

Ketiga, berkaitan dengan faktor aksessibilitas terhadap program bantuan pemerintah. Program bantuan pengentasan kemiskinan belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat pesisir. Khusus untuk bantuan peralatan menangkap ikan

dan petani, mempersyaratkan adanya kelompok yang beranggotakan dari beberapa orang masyarakat. Kelompok tersebut kemudian menyusun proposal bantuan yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Akan tetapi ada pula kelompok yang tidak memiliki kompetensi dalam menyusun proposal. Kelompok seperti ini biasanya meminta bantuan kepada pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan atau kepada aparatur kampung untuk membuatkan proposal. Bagi warga yang tidak mendapatkan bantuan disebabkan oleh tidak memiliki kelompok dan banyak diantara mereka memang tidak mengetahui adanya bantuan sehingga tidak berusaha membentuk kelompok. Ada pula pengakuan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi dari kepala kampung akan adanya pertemuan sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan ataupun dinas-dinas yang lainnya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang diundang untuk hadir dalam setiap pertemuan.

Selain masalah informasi dan ketidaktahuan membuat kelompok, faktor lain yang menyebabkan masih kurangnya masyarakat pesisir yang mendapatkan bantuan adalah akibat keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga memilih-milih kelompok sasaran yang akan diberikan prioritas untuk mendapatkan bantuan. Untuk program-program bantuan yang sifatnya lanjutan dari program sebelumnya, maka kelompok nelayan yang pernah mendapatkan bantuan itulah yang diundang, sehingga mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan semakin terpuruk.

Berikut ini beberapa jenis bantuan yang pernah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke adalah dengan adanya pengembangan usaha budidaya (budidaya ikan lele), alat tangkap ikan (jala dan jaring), bibit ikan air tawar, serta alat-alat pertanian (alsintan). Anggota kelompok pada umumnya hanya mendapatkan satu jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya: anggota kelompok yang telah memiliki perahu, maka bantuan yang diberikan kepada mereka adalah mesin. Jika telah memiliki mesin dan perahu, maka bantuan yang diberikan kepadanya adalah bibit ikan.

Dilihat dari beberapa bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat pesisir, sebenarnya pemerintah telah memberikan bantuan yang telah sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan masyarakat pesisir. Namun dalam kenyataannya, masyarakat yang ada di pesisir pantai umumnya masih hidup dalam berkekurangan. Bantuan yang pernah diperoleh masih dirasa kurang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, sehingga hasil tangkap atau hasil panen lahan sawahnya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup semata. Masih kurang diantara mereka yang memiliki tabungan untuk persiapan biaya pendidikan anak-anak dan untuk biaya berobat ke rumah sakit manakala mereka sakit.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab masyarakat pesisir Kampung Urumb tetap berada dalam garis kemiskinan: *Pertama*, kesadaran terhadap kemiskinan yang dialami akan tetapi tidak dibarengi dengan kerja keras dan keinginan yang kuat untuk terbebas dari kemiskinan. Masyarakat cenderung merasa aman, karena untuk mendapatkan ikan untuk dijadikan lauk ketika makan dapat diperoleh dengan mudah dilaut. Selama ini mungkin masyarakat dimanjakan dengan potensi wilayah pesisir yang cukup tinggi, sehingga tidak pernah berfikir untuk melakukan upaya mendapatkan hasil

lebih melalui usaha-usaha yang lainnya. Karena individu bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri (Karsidi, 2007).

Kedua, pemanfaatan waktu luang yang tidak efisien. Masa tanam padi hingga panen memakan waktu 30 sampai 40 hari. Waktu luang yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga petani di wilayah pesisir, tetapi lebih banyak digunakan untuk berdiam diri di rumah. Waktu kosong seperti ini dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif sambil menunggu masa panen tiba. Terlebih lagi ketika masa hujan tiba maka intensitas melautpun semakin kecil, sehingga pendapatan dari lautpun akan sangat berkurang. Sebagai seorang yang berdaya harusnya mereka mampu untuk memanfaatkan waktu-waktu luang seperti itu untuk membangun kekuatan dan usaha yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menopang keberlangsungan hidup keluarga dan menjadi kekuatan ekonomi, sosial, pendidikan (Sutarto, 2018).

Ketiga, kurang kreatif karena keterbatasan keterampilan dan akses informasi. Rendahnya tingkat pendidikan disadari sangat berpengaruh terhadap kreativitas dan kemampuan untuk mencari solusi alternatif atas permasalahan yang dihadapi. Pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan keterampilan melalui program-program pelatihan terutama kepada masyarakat pesisir khususnya kaum ibu-ibu. Hal ini karena mereka yang lebih sering berada di rumah dan dapat dengan leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja sewaktu menunggu suaminya pulang dari laut. Hal ini disebabkan selain latar belakang pendidikan mereka yang rendah, mereka juga tidak mempunyai keterampilan khusus yang bisa membantu perekonomian keluarga (Sudirman & Rosramadhana, 2022).

Keempat, pada kebanyakan keluarga miskin yang hidup di pesisir Kampung Urumb, kemiskinan telah dianggap sebagai sebuah nasib yang harus diterima dengan pasrah. Sikap seperti ini cenderung membuat masyarakat pesisir pasif dalam menghadapi situasi yang dialaminya. Ketika mereka telah mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya makan, minum, dan lauk, maka akan memberikan rasa puas bagi mereka. Ini menunjukkan daya juang mereka yang masih lemah. Sikap seperti inilah yang perlu disadarkan agar masyarakat pesisir yang masih hidup dalam jeratan kemiskinan dapat bangkit dan berjuang untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan (Aminuddin et al., 2022).

Kelima, akses terhadap modal usaha yang sangat rendah. Beberapa keluarga kurang mampu di wilayah pesisir Kampung Urumb mengaku, rendahnya tingkat pendapatan khususnya dalam tangkapan ikan, petani padi, maupun kelompok usaha lainnya diakibatkan karena minimnya peralatan dan modal usaha yang dimiliki. Terkadang bantuan dana diterima dari Pemerintahan Kampung Urumb melalui dana kampung yang diberikan untuk program-program pemberdayaan, namun jumlahnya pun tidak begitu besar dan tidak dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa terkadang mereka sempat ingin mencari modal usaha lewat sistem perbankan, akan tetapi mereka tidak yakin karena mereka tidak memiliki

jaminan yang dapat meyakinkan pihak pemberi modal atas pinjaman yang akan mereka ajukan. Masalah permodalan ini adalah salah satu faktor yang selalu muncul dalam proses usaha masyarakat (Karsidi, 2007).

Keenam, kelembagaan kelompok nelayan yang masih sangat lemah. Ada fenomena bahwa mereka yang telah memiliki kelompok nelayan dapat memperoleh bantuan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Untuk mendapatkan bantuan, kelompok tersebut harus membuat proposal yang diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Bagi kelompok nelayan yang tidak mampu membuat proposal, biasanya meminta bantuan dari pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Namun masih banyak diantara kelompok nelayan yang belum membentuk kelompok, hal ini disebabkan karena tidak mengerti tata cara dan prosedur untuk membentuk kelompok. Padahal penguatan kelompok masyarakat adalah salah satu faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan (Irawan & Adam, 2023).

Ketujuh, transfer teknologi yang lambat. Dalam proses produksi, para petani maupun nelayan masih mengandalkan peralatan tradisional. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat baik nelayan maupun petani. Selain karena tingkat Pendidikan mereka yang rendah, juga di sebabkan karena hampir tidak adanya kegiatan-kegiatan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pelatihan dan pendampingan pada kelompok nelayan dan petani di wilayah pesisir Kampung Urumb. Seolah mereka lupa jika focus utama sebuah pembangunan adalah sumber daya manusianya sendiri yang berfungsi sebagai motor penggerak semua program pembangunan (Dwomoh, 2022).

Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

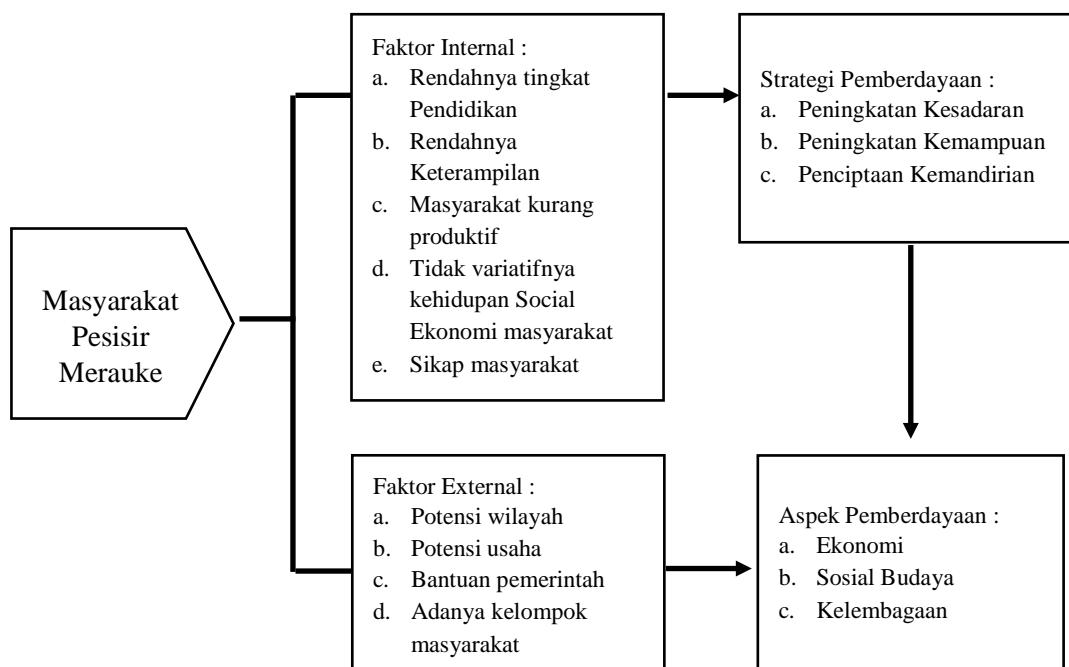
Hasil analisis dari faktor internal dan eksternal individu masyarakat pesisir memiliki potensi dan peluang untuk diberdayakan. Analisis faktor internal masih menunjukkan lemah terutama dalam hal pendidikan, budaya, dan sikap masyarakat. Namun telah kuat dalam hal kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini terbukti dengan kehidupan rukun dan damai yang ada di wilayah pesisir, serta seringnya diadakan kegiatan-kegiatan pesta adat yang mana kegiatan tersebut melibatkan seluruh element masyarakat.

Sedangkan hasil analisis terhadap faktor eksternal menunjukkan potensi pemberdayaan terhadap masyarakat dilihat dari potensi wilayah yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha, bentuk bantuan dari pemerintah yang diberikan telah mengarah kepada upaya pemberdayaan, namun dari segi kelembagaan masih rendah karena masih banyak masyarakat pesisir yang belum membentuk kelompok (nelayan/petani/usaha).Kelemahan lainnya adalah dari segi kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di kampung pesisir umumnya adalah di sektor perikanan yakni sebagai nelayan, menangkap udang / kepiting / mumu (kerang bambu).

Masyarakat pesisir umumnya hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Hanya sebagian kecil yang mendapatkan penghasilan dari sumber lain seperti buruh kasar atau pegawai negeri. Kecilnya proporsi masyarakat pesisir yang

memperoleh penghasilan dari luar pertanian dan perikanan mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat kurang bervariasi dan terkonsentrasi pada pekerjaan di sektor perikanan sebagai potensi utama di wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian, maka seharusnya dapat diciptakan dan dikembangkan alternatif kegiatan ekonomi produktif yang dapat menambah penghasilan keluarga pada warga pesisir, yang berasal dari hasil laut seperti mengolah ikan menjadi abon atau ikan asap, mengubah kerang-kerangan menjadi hiasan dinding, mengolah pisang menjadi camilan keripik dan lain sebagainya. Berikut ini akan digambarkan model pemberdayaan masyarakat pesisir berdasarkan hasil analisis penelitian:



Gambar 3. Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Merauke

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan harus dimulai dari internal individu masyarakat pesisir, yakni pertama-tama yang harus dilakukan adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai modal sosial yang akan berpengaruh bagi dinamika sosial-budaya masyarakat pesisir. Melalui peningkatan pendidikan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial-budaya, dan kelembagaan, dan pada akhirnya akan memandirikan masyarakat pesisir. Modal sosial ini juga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus menunggu uluran bantuan dari pemerintah (Oja & Serano, 2016).

Kemudian, langkah selanjutnya adalah peningkatan kemampuan intelektual masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pendampingan terkait dengan pengelolaan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada

kemandirian. Proses peningkatan kemampuan intelektual ini atau biasa disebut juga dengan tahap pendayaan, karena dalam tahap ini masyarakat diberikan daya / kemampuan untuk dapat menjalankan usaha ekonomi produktifnya dengan berbagai ide-ide dan inisiatif agar hasil produksi mereka tetap dapat diterima oleh pasar. Selain itu, dapat juga dengan memberikan pendanaan yang dapat digunakan sebagai modal usaha mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Tahapan ini sangat penting karena dari sinilah proses usaha masyarakat tersebut akan mulai berjalan, dan masyarakat yang belum mendapat bantuan akan tetap pada posisi tak berdaya. Anggaran merupakan salah satu pendorong pemberdayaan dapat berjalan dengan baik (Irawan & Tanzil, 2020).

Setelah dua tahapan tersebut dilakukan, maka tahapan yang ketiga adalah proses penciptaan kemandirian masyarakat. Dalam tahapan ini akan dilihat sejauh mana keberhasilan dari pemberdayaan itu dilaksanakan, produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan, dan dampak dari proses pemberdayaan itu sendiri. Dampak dari kegiatan ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu keterampilan masyarakat sasaran dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha mereka (Aminuddin et al., 2022). Proses akhir dari pemberdayaan ini adalah masyarakat mampu mengembangkan diri mereka sendiri dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka masing-masing dengan kemampuan diri yang dimilikinya (Arif & Primastuti, 2019).

KESIMPULAN

Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Kampung Urumb Kabupaten Merauke dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari aspek internal dan eksternal. Dari aspek internal, kualitas individu masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan dan petani masih kurang mendukung upaya pemberdayaan. Hal ini terlihat dari aspek pendidikan masyarakat dan motivasi dirinya yang rendah. Sedangkan jika dilihat dari segi sosial budaya terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selain rutinitas sehari-hari seperti berburu, mencari ikan, memasak, ngobrol dengan tetangga, mereka juga masih tetap menjaga kekerabatan diantara tetangga. Aspek eksternal, program-program bantuan yang telah diberikan pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Namun dalam kenyataannya belum mampu memberdayakan mereka, disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah sehingga bantuan-bantuan yang diberikan belum dapat menjangkau semua masyarakat pesisir yang ada di kampung-kampung.

Selain itu, program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah hanya jadi sebatas program habis pakai, yang tidak ada keberlanjutannya. Hal ini juga diakibatkan oleh tidak adanya pendampingan dari pemerintah kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat yang ada. Dari segi potensi wilayah pesisir, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Seperti pengolahan hasil laut berupa ikan dan udang yang harusnya dapat memberikan nilai ekonomis yang lebih dari pada hanya sebatas menjual ikan segar saja.

Dengan demikian, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah dalam upaya pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir di Kampung Urumb Kabupaten Merauke

perlu memperhatikan dua aspek yakni aspek internal dan aspek eksternal individu. Aspek internal terutama bagaimana meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat pesisir melalui program-program pelatihan yang sesuai dengan potensi usaha yang dapat dikembangkan. Sedangkan aspek eksternal adalah bagaimana mengupayakan agar ekosistem lingkungan tetap dapat terjaga kelestariannya sehingga dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga secara berkelanjutan, serta bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetap harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan usaha produktifnya.

DAFTAR PUSTAKA:

- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan_Dan_Penyebabnya. *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service*, 1(April), 43–50.
- Aminuddin, M. Y., A'yun, I., Rosyidah, I., & Sunnah, S. H. (2022). Community Empowerment Efforts Through Creative Economy Ar the Bubah Beauty Course and Training Institute (Lkp) Banjarworo Bangilan Village. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.52166/baktikita.v3i2.3390>
- Arif, A., & Primastuti, A. (2019). Coastal Community Empowerment: Methods, Challenges and Solutions. *International Journal of Kybernetology*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.33701/ijok.v3i1.582>
- Dwomoh, D. (2022). *Modeling Inequality of Access to Agricultural Productive Resources in Coastal and Non-Coastal Rural Communities in Central Region of Ghana: Implication for Food Security and Women Empowerment*.
- Hamdani, H., & Wulandari, K. (2016). Faktor Kemiskinan Nelayan Tradisional. *E-Sospol : Electronic Journal of Social and Political Sciences*, 3(1), 62–67.
- Irawan, A., & Adam, A. F. (2023). Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke. ... *Journal of Public Administration*, 5(2). <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/view/5142%0Ahttps://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/5142/2837>
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(2), 129–139. <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.3121>
- Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan*, 3(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i2.2161>
- Kusnadi. (2017). *Keberdayaan nelayan & dinamika ekonomi pesisir* (Abdul Qadir Shaleh (ed.)). Ar-Ruzz Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. & Johnny, S. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook, Third Edition* (3rd ed.). United States of America: SAGE Publications.
- Oja, H., & Serano, V. R. (2016). Anlisis Pengembangan Modal Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten merauke. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 5(02), 73–87.

- Phoek, I. C. A. (2022). Coastal Community Economic Empowerment Strategy in Merauke Regency. *Macro Management & Public Policies*, 3(4), 14–19. <https://doi.org/10.30564/mmpp.v3i4.4256>
- Setyo Putra, T., & Rahaju, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Policy and Maritime Review*, 23–34. <https://doi.org/10.30649/pmr.v1i2.31>
- Sudirman, R., & Rosramadhana. (2022). Pemberdayaan Perempuan dalam Pemanfaatan Limbah Kulit Kerang Menjadi Keterampilan Keluarga di Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 7(2), 174–183.
- Sutarto, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Persepektif Gender. *Politika, Jurnal Trias*, 2(2), 267–283.
- Widiastuti, M. D., Samderubun, G., & Arifin, T. (2018). Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai Melalui Pendekatan Ekonomi (Studi Kasus Penggalian Pasir Di Pantai Nasai – Kabupaten Merauke). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.15578/jkseksp.v8i1.6850>
- Winata, I. N. P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Pengembangan Usaha Perikanan. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 91. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12053>